

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Kecamatan Lumbir



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Lumbir, 19 Juli 2024
CAMAT LUMBIR



SUSANTI TRI PAMUJI, S.STP. M.Si
NIP. 19830331 200112 2 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	4
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
	Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	
	Perangkat Daerah	46
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...	69
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	72
3.3	Program Dan Kegiatan.....	73
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	90
BAB V	PENUTUP	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana pembangunan daerah kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana di tingkat perangkat daerah mulai dari perencanaan jangka menengah lima tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan jangka pendek periode satu tahun yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Kedua, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap ketiga adalah penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bappeda untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Tahap keempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA dan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Selanjutnya adalah tahap perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah penetapan. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD). Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD

harus konsisten dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai tugas pokok fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (RKPD) Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas selama periode Renja.
3. Sebagai pedoman Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam matrik Renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah memberikan gambaran yang terukur mulai dari target kinerja yang diperhitungkan dengan pendanaan yang tersedia. Namun sebelum menentukan target dan pendanaan di Tahun 2025, maka perlu evaluasi ke belakang dengan melihat capaian baik realisasi keuangan maupun realisasi indikator kinerja yang dilaporkan di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan di kecamatan Lubir Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

No	Nama Program	Pagu DPA (Rp)	Total Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2,178,630,870	2,121,700,696	97,02
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4,400,000	4,250,000	96,61
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	26,927,000	26,574,500	98,67
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	128,000,000	124,480,500	97,25
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	153,350,000	150,773,100	98,33

Dari tabel diatas kita bisa lihat bahwa realisasi keuangan tertinggi ada pada program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 98,67%, sementara terendah ada pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di angka 96,61%. Rendahnya

penyerapan dikarenakan ada kegiatan pelaksanaan non perizinan di perjalanan dinas terkait SPPD yang terlambat laporan untuk pertanggungjawaban dan makan minum rapat kurang terealisasi.

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diampu Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Kecamatan Lumbir Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)
				1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima									
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86	99	91	93	92.5	92.5	107.56
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat									
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%	100	50	50	79	100	100	100
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	2	2	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	1	3	3	3	100

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1	1	3	3	3	100
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	13	13	13	13	13	86.67
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1	1	4	4	4	100
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	5	5	5	5	5	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	3	3	5	5	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	4	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	3	4	5	5	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	135	25	27	44	135	135	100
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	0	0	0	1	1	33.33
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	1	1	20
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	8	12	12	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	5	12	12	100
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9	9	9	9	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	2	5	5	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	100
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan Lumbir	Jenis	2	2	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	36	0	0	13	15	15	41.67
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	0	2	3	9	9	100
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	10	10	10	10	10	10	100
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	7	7	7	7	7	100
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	2	4	4	4	4	200
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1	1	3	4	4	100
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertib an umum Kecamatan Lumbir	%	100	75	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	1	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	3	3	4	4	4	100
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	0	0	0	0	0	0
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
[INDPROGRAM]	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Lumbir	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes di Kecamatan Lumbir	desa	10	10	10	10	10	10	100
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	10	4	5	7	7	100
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 terdapat perubahan indikator dan target di bandingkan dengan tahun anggaran 2023, terutama untuk indikator tujuan dan indikator sasaran. Hal ini karena Rancangan Akhir Renja Kecamatan lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2025 mendasarkan pada Renstra Transisi Tahun 2024-2026 dimana pada renstra tersebut terdapat perubahan isu strategis yang harus di selesaikan oleh setiap perangkat daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, maka Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan

lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas

- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desadan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; JDIH Kabupaten Banyumas

- 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayahkecamatan kepada bupati;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerahdi tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansivertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatankepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuanyang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemerintahan Desa
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4) Seksi Pelayanan;
 - 5) Seksi Ekonomi Pembangunan

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD adalah Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatas maka ada beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat;
- b. Belum Optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Belum Optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Belum Optimalnya peran kecamatan dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor kecamatan, system teknologisasi serta kurangnya dukungan dalam mencapai terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja kerja perangkat daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Pagu pada rancangan awal tentunya berubah sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Matrik rancangan awal akan kami tampilkan pada tabel 2.3 di bawah ini, Pada Rancangan Awal pagu anggaran yang tersedia adalah Rp 2.465.137.000,-

**Tabel 2. 3 Rancangan Akhir Renja Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		
KECAMATAN LUMBIR				2.465.137.000		
7	UNSUR KEWILAYAHAN			134.000.000		
07.01	KECAMATAN			134.000.000		KECAMATAN LUMBIR
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Indeks	7000.000		KECAMATAN LUMBIR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	7000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	3.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			45.000.000		KECAMATAN LUMBIR
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	45.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah			15.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

	Kerja Kecamatan					
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	25.000.000		KECAMATAN LUMBIR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

		Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	25.000.000		KECAMATAN LUMBIR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%			
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	32.000.000		KECAMATAN LUMBIR
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	32.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	3500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			13500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	10 Dokumen			

		dan Pendayagunaan Aset Desa				
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X	NON URUSAN			2.331.137.000		
X.XX	NON URUSAN			2.331.137.000		KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2.331.137.000		KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	6500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.250.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.250.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.747.637.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.727.137.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	20.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%			

X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.500.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			

X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	55.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	265.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%			
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit	27.000.000	Kab. Banyumas	KECAMATAN LUMBIR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas memiliki 1 tujuan dengan merujuk pada Rencana Strategis Transisi Tahun 2024-2026. Tujuan dimaksud diturunkan menjadi 2 sasaran strategis.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas” Indikator dari tujuan sebagaimana dimaksud diatas adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan .

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas didapatkan dengan rumus 50% x capaian sasaran pelayanan kecamatan +50% capaian akuntabilitas kecamatan. Nilai hasil persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

3.2 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Tahun	Capaian Sasaran Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2022	100	82,8	91,4
2023	100	83,0	91,5

Selanjutnya Target Tujuan dan Sasaran pada Renja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

3.3 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas		persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	100
2		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100
3		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,5

Selanjutnya dari tujuan tersebut, kemudian dijabarkan menjadi 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan

Pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan dengan indikator Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan.

Berikut tabel capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3.4 Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan 2024

No	Program	Realisasi		Persentase Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Pubik	100	100	20	20
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100	20	20
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	100	20	20
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	20	20
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	20	20
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan				100	100

2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP

pemerintahan kecamatan. Berikut tabel capaian akuntabilitas pemerintah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas :

Tabel 3. 5 Nilai Sakip Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	25.5	25.5
2	Pengukuran Kinerja	25.5	25.5
3	Pelaporan Kinerja	12.3	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	19.5	20
Nilai Hasil Evaluasi		82,8	83
Tingkat Akuntabilitas		B	A

3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2025 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas akan mengelola 6 (enam) Program, 11 (lima belas) kegiatan dan 27 (empat puluh tiga) Subkegiatan. Berikut adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada Renja Tahun 2025:

Tabel 3. 6 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan
7.01.0.00.0.00.13.00 KECAMATAN LUMBIR					
7.01.0.00.0.00.13.01 KECAMATAN LUMBIR					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu
		Meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7010620103	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7010620106	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Kecamatan yang terkait dengan Nonperizinan	7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas
		Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
		Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

		Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan
		Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan

		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintah kecamatan	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum

		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan
		Tersedianya Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Tersedianya Mebel	7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2024
ditunjukkan pada lampiran matrik renja sebagai berikut:

Rancangan Akhir Renja 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
1	7	01	01	2.01	0001	Kecamatan Lumbir			2.465.137.000,00				2.597.087.000,00
						UNSUR KEWILAYAHAN			2.465.137.000,00				2.597.087.000,00
						KECAMATAN			2.465.137.000,00				2.597.087.000,00
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.335.687.000,00			-	2.458.587.000,00
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.480.000,00			-	7.000.000,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.230.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.500.000,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.250.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.500.000,00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.752.371.916,00			-	1.843.787.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.736.771.916,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.823.287.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.500.000,00
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	145.860.000,00			-	152.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.142.500,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.927.500,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	9.068.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.707.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.450.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

	7	01	01	2.06	0010	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
	7	01	01	2.07		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5.565.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	52.000.000,00			-	35.000.000,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	7	01	01	2.08		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	52.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	362.719.084,00			-	332.800.000,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	7	01	01	2.08	0003	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	54.334.924,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51.000.000,00
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	7	01	01	2.08	0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	7	01	01	2.09		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	303.584.160,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275.800.000,00
	7	01	01	2.09	0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16.256.000,00			-	87.500.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

2	7	01	01	2.09	0006	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.300.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	7	01	01	2.09	0010	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.690.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	7	01	02			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.266.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000,00
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	9.000.000,00		-	9.500.000,00
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	9.000.000,00		-	9.500.000,00
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
3						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	38.150.000,00		-	46.500.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	38.150.000,00		-	46.500.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						

4	7	01	03	2.01	0002	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.000.000,00
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	13.650.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.500.000,00
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	29.500.000,00			-	25.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	29.500.000,00			-	25.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	24.500.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	39.000.000,00			-	25.000.000, 00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	39.000.000,00			-	25.000.000, 00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000, 00
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	13.800.000,00			-	32.500.000, 00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	13.800.000,00			-	32.500.000, 00
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000,0 0
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	11.300.000,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.500.000, 00
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Banyumas, Lumbir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000, 00
									J U M L A H	2.465.137.000,00			2.597.087.0 00,00

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini menjadi sangat penting artinya sebagai alat kendali perencanaan, mengingat dokumen ini disusun berdasarkan perkembangan kondisi yang terjadi mulai dari terbitnya ketentuan peraturan baik pada tingkat pusat maupun provinsi yang terbaru maupun menyesuaikan target kinerja serta pendanaan. Pada prinsipnya target kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2025 ini sudah mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 (n-1) dan juga disesuaikan berdasarkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Renja Kecamatan Lumbir Kab. Banyumas Tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menggambarkan target kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas berdasarkan anggaran yang tersedia. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh Staf Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dan lebih terukur dimasa yang akan datang.

Lumbir, 19 Juli 2024
CAMAT LUMBIR



SUSANTI TRI PAMUJI, S.STP. M.Si
NIP. 19830331 200112 2 002